

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan pondasi yang harus dimiliki oleh semua manusia demi kelangsungan hidup yang lebih baik. Hal tersebut disadari oleh pendiri Negara dalam pembentukan awal pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan merumuskan sebuah Undang-Undang Dasar tahun 1945 masalah pendidikan yang dicantumkan pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.

Dalam dunia pendidikan ada berbagai sistem pendidikan, salah satunya adalah lembaga pendidikan sekolah Inklusi. Sekolah Inklusi adalah program pemerintah dalam bidang pendidikan yang baru keberadaannya di Indonesia, yang merupakan sebuah langkah pendekatan yang berusaha mentransfer sistem pendidikan yang meniadakan hambatan yang dapat menghalangi semua siswa baik yang normal maupun yang berkebutuhan khusus untuk berperan aktif dalam pendidikan. Jadi, pendidikan Inklusi adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama anak lainnya (normal) demi mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Menurut Firdaus (2010), Pendidikan Inklusi di Indonesia diawali pada awal tahun 1960-an oleh siswa tunanetra asal Bandung yang didukung oleh organisasi tunanetra. Pada masa itu SLB hanya sampai pada tingkat SLTP, kemudian siswa tunanetra ini memperoleh kursus kerajinan tangan maupun pijat, namun beberapa

pemuda tunanetra bersikeras ingin melanjutkan pada tingkat SLTA meskipun pada awalnya terjadi penolakan dari pihak SLTA. Namun, lambat laun beberapa sekolah SLTA mau menerima siswa tunanetra.

Pada tahun 1970-an, pemerintah mulai menaruh perhatian pada pendidikan Integrasi, dirasa telah sukses pada pelaksanaannya, maka pemerintah menerbitkan surat keputusan menteri pendidikan nomor 002/U/1986 tentang pendidikan terpadu bagi anak cacat yang mengatur bahwa anak penyandang cacat yang memiliki kemampuan diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama dengan anak sebayanya yang tidak cacat di sekolah biasa. Namun, pada saat program pendidikan ini berakhir, implementasi pendidikan integrasi masih kurang bisa dipraktekkan terutama pada jenjang SD. Pada akhir tahun 1990-an upaya perbaikan pendidikan integrasi baru dilakukan melalui kerjasama antara Depdiknas dan pemerintah Norwegia di bawah managemen Braillo Norway dan Direktorat PLB, agar tidak mengulangi kesalahan yang telah dibuat sebelumnya maka perhatian diberikan pada substantibilitas program pengimplentasian pendidikan Inklusi, sehingga disusunlah beberapa strategi untuk mengatasinya. Akhirnya pada tahun 2004, dilaksanakan deklarasi Nasional tentang pendidikan Inklusi di kota bandung (Firdaus, 2010).

Penerapan sekolah Inklusi di Indonesia yang awalnya umum menjadi khusus atau sekolah inklusi tidak sama karena untuk menjadi sekolah inklusi membutuhkan tenaga pengajar yang khusus, dan sistem pembelajaran yang berbeda, maka tidak bisa berubah secara langsung namun bertahap sesuai dengan kebutuhan dan alat-alat pendukung sekolah Inklusi (Firdaus, 2010).

Pada tahun 2009 pemerintah lewat menteri pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan peraturan tentang sekolah Inklusi dengan peraturan Menteri RI Nomor 70 tahun 2009 pasal 2, tentang tujuan dari pendidikan Inklusi di Indonesia adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau yang memiliki bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pasal 3 ayat 1, bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pasal 3 ayat 2, bahwa peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri atas: tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba/ obat terlarang/ zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya, tunaganda.

Dengan mengacu UU Sisdiknas tahun 2005, pasal 5 ayat 1 yang menegaskan setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Semua instrumen hukum di atas menegaskan bahwa seluruh anak warga Negara Indonesia, tidak terkecuali, berhak mendapatkan pendidikan yang sama dan perlakuan yang sama pula oleh pemerintah dengan fasilitas yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang ada. Demikian diharapkan agar tercipta anak-anak Indonesia penerus bangsa yang berkualitas dan bermartabat.

Penyelenggaraan pendidikan sekolah Inklusi di Indonesia pada saat ini masih terkendala oleh beberapa masalah, diantaranya adalah belum seimbangnya jumlah pendidik dengan jumlah peserta didik, serta keefektifan belajar yang masih kurang. Berbagai penelitian yang terjadi di sekolah Inklusi banyak yang berkaitan dengan tenaga pengajar (Praptiningrum 2010; Prastadila & Paramita 2013; Puspitasari & Handayani 2014). Lebih spesifik lagi Hidayah (2010), mengatakan bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus yang menempuh pendidikan di sekolah inklusi dengan jumlah pendidik dengan latar belakang pendidikan khusus masih belum seimbang, akibatnya proses belajar mengajar tidak berjalan dengan optimal. Di satu sisi seorang guru harus berjuang keras untuk memenuhi tuntutan hati nurani untuk membekali pengetahuan bagi seluruh muridnya, dan di sisi lain guru tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menyampaikan materi pelajaran kepada anak yang berkebutuhan khusus, jadi ini menjadi beban tersendiri bagi guru yang di dalam kelasnya terdapat anak yang berkebutuhan khusus (Praptiningrum, 2010).

Seorang guru pada sekolah inklusi harus memahami karakteristik anak berkebutuhan khusus. Adapun karakteristik kemampuan belajar anak berkebutuhan khusus menurut Gable & Hendrickson (Mahabbati, 2013), yaitu pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki kurang, mudah lupa dengan pengetahuan atau keterampilan yang baru diperoleh, kesulitan dalam menyiapkan diri untuk belajar, kesulitan dalam memperhatikan pelajaran, memiliki masalah dalam motivasi belajar atau mengerjakan tugas, kesulitan dalam berbahasa ekspresif atau bahasa reseptif, lemah dalam keterampilan sosial dan pemecahan masalah, rendahnya kemampuan

membantu diri dan kemampuan beradaptasi dan merasakan dampak-dampak lain dalam kehidupan sehari-hari akibat kebutuhan khususnya.

Berdasarkan gambaran karakteristik anak berkebutuhan khusus tersebut di atas, maka jika guru tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus akan menjadi beban tersendiri, karena guru mengalami kesulitan dalam memahami dan mengajar siswa dengan berbagai karakteristik yang berbeda. Menurut Ninda (2014), guru yang berada di sekolah Inklusi jauh berbeda dengan guru sekolah umum, baik dalam pemenuhan kebutuhan informasi yang mencakup perannya sebagai pengajar serta kebutuhan siswa-siswinya, hal ini dikarenakan guru sekolah Inklusi tidak hanya mengajar anak-anak normal melainkan mengajar ABK pula.

Uraian di atas menunjukkan bahwa beban yang dihadapi oleh guru pada sekolah Inklusi sangat jauh berbeda dengan guru pada sekolah umum, hal ini dikarenakan beban yang diterima sangat jauh berbeda karena tuntutan untuk menjadi guru sekolah inklusi dibutuhkan kompetensi dan pendidikan khusus, sehingga mengakibatkan sebagian guru yang mengajar di sekolah Inklusi sering mengalami stres ketika menghadapi keanekaragaman karakter anak didiknya. Jadi, tingkat stres yang dialami oleh guru pada sekolah inklusi lebih besar dari pada guru yang mengajar di sekolah umum. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Hidayah (2011), yang menyatakan bahwa tingkat stres yang dialami guru sekolah Inklusi memiliki intensitas lebih tinggi dibandingkan dengan guru sekolah umum.

Seorang guru pada sekolah Inklusi diharapkan mempunyai kompetensi dalam mengajar kelas Inklusi. Menurut Wiratno (2013), terdapat tiga kemampuan yang harus dimiliki guru sekolah inklusi, antara lain:

1. Kemampuan umum (general ability), yaitu warga Negara yang religious dan memiliki kepribadian, memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan diri, memiliki kemampuan untuk mengembangkan profesi yang dimiliki, memahami konsep-konsep dasar kurikulum serta cara pengembangannya, memahami desain pembelajaran kelompok dan individual serta mampu bekerja sama dengan profesi lain dalam pelaksanaan dan pengembangan di dalam profesinya.
2. Kemampuan dasar (basic ability), yaitu kemampuan untuk memahami dan mampu mengidentifikasi anak yang berkebutuhan khusus. Memahami konsep serta alat asesmen dan mampu melakukan asesmen pada anak yang berkebutuhan khusus. Kemampuan untuk merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program bimbingan dan konseling pada anak berkebutuhan khusus. Mampu melaksanakan manajemen ke PLB. Kemampuan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus. Mengetahui aspek-aspek medis dan implikasinya terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Mampu melakukan penelitian serta pengembangan di bidangnya.
3. Kemampuan khusus (specific ability), adalah kemampuan untuk memodifikasi perilaku anak berkebutuhan khusus. Menguasai konsep dan keterampilan untuk mengajar anak yang memiliki gangguan penglihatan. Menguasai konsep dan

keterampilan untuk mengajar anak yang memiliki kelainan pendengaran atau komunikasi. Menguasai konsep dan keterampilan untuk mengajar anak yang memiliki kelainan intelektual. Menguasai konsep dan keterampilan untuk mengajar anak yang memiliki kelainan anggota tubuh serta gerakannya. Menguasai konsep dan keterampilan untuk mengajar anak yang memiliki kelainan perilaku dan sosial. Menguasai konsep dan keterampilan untuk mengajar anak yang mengalami kesulitan belajar.

Seorang guru pada sekolah umum hanya dihadapkan pada peserta didik normal yang memiliki tingkat inteligensi rata-rata yang hampir sama, sedangkan guru pada sekolah Inklusi dihadapkan pada anak-anak yang memiliki tingkat inteligensi yang hampir berbeda atau memang jauh berbeda, karena pada sekolah Inklusi guru dituntut untuk bisa mengajar dan mendidik anak normal dan anak yang memiliki kebutuhan khusus misalnya anak tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, tunaganda dan yang memiliki kelainan lainnya.

Seorang guru dituntut untuk bisa membagi perhatian, bisa mendidik, kreatif dalam mencari cara-cara yang dapat membuat anak berkebutuhan khusus tertarik untuk belajar, mengetahui penanganan yang harus dilakukan jika anak berkebutuhan khusus sedang mengalami gangguan emosi, mengetahui tentang medis sehingga seorang guru dapat mengetahui makanan apa saja yang dilarang dan kegiatan apa yang tidak boleh dilakukan oleh anak berkebutuhan khusus.

Apabila guru sekolah Inklusi tidak bisa menjalankan perannya dan tuntutan tersebut, maka guru akan mengalami kesulitan dalam mengajar anak yang berkebutuhan khusus. Akhirnya proses pembelajaran tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini akan berakibat tidak baik kepada ABK dan guru tersebut akan mengalami stres kerja.

Tuntutan cukup besar juga datang dari orang tua siswa berkebutuhan khusus yang menginginkan anaknya dalam bidang akademik setara dengan anak normal atau menginginkan anaknya mendapat nilai bagus menjadi tekanan yang tinggi bagi guru, karena kenyataan yang diterima anak yang berkebutuhan khusus sangat lambat dalam menerima materi pelajaran yang diberikan, sehingga memerlukan kerjasama antara orang tua dan guru. Hal ini juga menjadi sumber stres bagi guru.

Menurut data statistik Kabupaten Lamongan tahun 2015/2016, terdapat 56 sekolah Inklusi yang terbagi pada 27 kecamatan dan terdapat 60 guru yang telah di training Inklusi. Menurut Diknas Kabupaten Lamongan pada tanggal 02 Juli 2016, mengatakan bahwa setiap sekolah Inklusi memiliki fasilitas yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan anak yang berkebutuhan khusus.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap tujuh guru di sekolah SDN PAJI, diperoleh hasil bahwa ada enam guru yang mengalami beban dalam mengajar anak berkebutuhan khusus di dalam kelas sehingga mengalami gejala stres kerja. Seorang guru terbebani dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus yang sering mengganggu temannya sehingga guru khawatir anak-anak yang normal akan terganggu dalam memperhatikan pelajaran dan tidak tercapainya target pembelajaran.

Selain itu, emosi yang kurang stabil dari anak berkebutuhan khusus yang terkadang marah atau teriak-teriak tanpa sebab di dalam kelas atau pada saat kegiatan tertentu sehingga guru merasa panik, khawatir serta bingung apa yang harus dilakukan.

Para guru terbebani tentang banyaknya waktu yang tersita untuk memberikan les privat (tambahan pelajaran setelah jam pelajaran selesai tanpa memungut biaya) atau remidi anak yang kebutuhan khusus, meskipun setelah diberikan remidi-pun anak-anak yang berkebutuhan khusus nilainya masih sama yaitu di bawah standart yang telah ditentukan. Hal ini membuat guru menjadi sedih dan jenuh karena di satu sisi guru mempunyai tanggung jawab untuk mengajar siswa-siswinya dan di sisi lain tidak ada yang tidak naik kelas tiap tahunnya.

Adapun indikasi stres pada tujuh guru yang telah peneliti peroleh, terdapat enam guru yang mengalami stres kerja diantaranya mengalami tanda-tanda seperti di bawah ini:

- a. Jantung berdebar-debar dan denyut jantung lebih cepat dari biasanya pada saat sebelum memberikan pelajaran, saat memberikan pelajaran dan setelah memberikan pelajaran.
- b. Merasa tegang dan nyeri otot pada leher dan bahu, pada saat sebelum memberikan pelajaran, saat memberikan pelajaran dan setelah memberikan pelajaran.
- c. Berkeringat dingin dan basah pada telapak tangan, pada saat sebelum memberikan pelajaran, saat memberikan pelajaran dan setelah memberikan pelajaran.

- d. Merasa sakit perut, perut terasa mual, mau muntah dan perut terasa penuh.
- e. Daya ingat menurun dan sering lupa.
- f. Merasa kesulitan memberikan ide pada saat mengajar.
- g. Mudah tersinggung dan cepat marah dalam menghadapi siswa.

Sedangkan dari tujuh guru satu diantaranya tidak mengalami stres kerja mengungkapkan bahwa apa yang dikerjakan dibuat senang dan dinikmati menjadi guru sekolah Inklusi sehingga bisa mengatasi apa yang dihadapi dari kekurangan anak yang berkebutuhan khusus dan dapat menyelesaikannya dengan baik.

Menurut Chaplin (2011), Stres merupakan suatu keadaan dimana seorang individu merasa tertekan secara fisik maupun Psikologis. Serupa dengan Chaplin (2011), Munandar (2008) mendefinisikan stres sebagai suatu keadaan yang negatif, dimana kondisi tersebut mengarah pada timbulnya penyakit fisik dan mental, atau mengarah pada perilaku yang tidak wajar.

Stres kerja dapat timbul akibat dari beban kerja yang berlebih dan tuntutan pekerjaan yang cukup tinggi. Tanda-tanda seorang individu mengalami beban kerja yang berlebih adalah mudah tersinggung, kelelahan fisik dan mental, tidak tegas dalam mengambil keputusan, hilangnya objektivitas, kecenderungan untuk berbuat salah, kekhilafan dalam ingatan dan ketegangan dalam hubungan interpersonal (Munandar, 2008).

Berdasarkan kondisi di atas diasumsikan ada beberapa faktor yang mempengaruhi stres kerja. Robbins & Judge (2008) mengemukakan faktor yang

mempengaruhi stres kerja yaitu tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan antar pribadi, persoalan keluarga, persoalan ekonomi dan kepribadian. Borg (1991) menambahkan bahwa komitmen kerja juga merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan stres kerja dan yang menjadi fokus penelitian adalah komitmen kerja pada guru sekolah Inklusi.

Banyaknya tuntutan yang harus dihadapi oleh guru pada sekolah Inklusi untuk mengajar anak-anak normal dan anak-anak yang berkebutuhan khusus, maka para guru membutuhkan komitmen kerja yang tinggi. Borg (1991), menyatakan bahwa guru yang kurang puas dengan pekerjaannya dan komitmen yang dimilikinya rendah, akan mengalami tingkat stres yang lebih besar dibandingkan dengan guru yang memiliki komitmen yang tinggi. Komitmen dalam mengajar sangat dibutuhkan oleh seorang guru untuk melewati masa-masa sulit dan melelahkan dalam mengajar yang dapat mengakibatkan timbulnya stres (Santrock, 2007).

Menurut Setiawati & Zulkaida (2007), komitmen kerja adalah kemauan seseorang dalam melakukan sebuah pekerjaan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dengan hasil yang baik, sebagai bukti dan sarana penunjukan jati dirinya demi mendapatkan suatu pengakuan yang baik di dalam organisasi. Makna tersebut hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Kurniasih (2013) yang menyatakan bahwa komitmen guru adalah penafsiran internal seorang guru tentang bagaimana dia memaknai pekerjaannya yang ditandai dengan keinginan untuk menetap di suatu organisasi dan terlibat dalam suatu pekerjaan serta keinginan untuk mempengaruhi proses belajar siswanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti ingin mengetahui hubungan antara komitmen kerja dengan stres kerja pada guru inklusi. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengaitkan antara komitmen kerja dengan stres kerja pada guru sekolah Inklusi di Lamongan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan antara komitmen kerja dengan stres kerja pada guru sekolah inklusi di kabupaten Lamongan?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui hubungan antara komitmen kerja dengan stres kerja pada guru sekolah Inklusi di kabupaten Lamongan.

D . Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan informasi secara lebih luas dan jelas bagi ilmu Psikologi, khususnya Psikologi Industri dan organisasi yang berkaitan dengan Komitmen kerja.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi institusi Pendidikan

Dapat mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi stres pada guru sehingga dapat membuat program atau kebijakan yang dapat membuat guru untuk mengatasi stres.

b. Bagi Guru

Bisa mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi stres sehingga dapat mengantisipasi agar guru tidak stres.